

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA NUPABOMBA KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA

Nurul Rezkita Oktaviani ^{1*}; M. Nur Alamsyah ²; Rusmawaty Bte Rusdin ³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; Oktavianinurulrezkita@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; mnuralamsyahsip@gmail.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; rusmawatyrusdin19@gmail.com

*Correspondence : Oktavianinurulrezkita@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: peran pemerintah, pemberdayaan, kelompok tani, pertanian, partisipasi.

Received. : Mei 2025

Revised. : Juni 2025

Accepted : Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat desa, anggota kelompok tani, serta penyuluh pertanian. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan empat peran utama dalam pemberdayaan, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Namun, pelaksanaan keempat peran tersebut belum berjalan optimal. Peran sebagai regulator belum disertai pengawasan dan regulasi yang mendetail. Sebagai dinamisator, pemerintah belum mampu mendorong partisipasi aktif petani secara berkelanjutan. Dalam perannya sebagai fasilitator, bantuan pertanian yang diberikan belum merata dan tidak diiringi pelatihan teknis. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah belum berhasil menciptakan inovasi dan jejaring kemitraan yang dapat mendukung pengembangan kelompok tani. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan peran penyuluh, serta integrasi program pemberdayaan yang partisipatif dan berkelanjutan untuk mendukung kemandirian petani.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the role of the government in empowering farmer groups in Nupabomba Village, Tanantovea District, Donggala Regency. The research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Informants in this study included village officials, members of farmer groups, and agricultural extension officers. Data analysis refers to the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the government has carried out four main roles in empowerment: as a regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst. However, the implementation of these roles has not been optimal. The role as a regulator lacks adequate supervision and detailed regulation. As a dynamizer, the government has not consistently encouraged active participation from farmers. As a facilitator,

agricultural assistance is not distributed evenly and lacks accompanying technical training. Meanwhile, as a catalyst, the government has not succeeded in creating innovation or building strategic networks to support the development of farmer groups. This study recommends the need for improved capacity of village apparatus, strengthening the role of agricultural extension services, and integrating participatory and sustainable empowerment programs to support farmer independence.

Pendahuluan

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam proses ini, pemerintah memegang peran yang sangat penting sebagai pengarah, pelaksana, dan pengendali pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah dalam upaya pembangunan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat desa, menjadi suatu keniscayaan (Moniung, 2023)

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis potensi lokal. Pemberdayaan tidak lagi dipahami sebatas pemberian bantuan, namun sebagai proses membangun kesadaran, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola kehidupannya secara produktif (Razak, 2023). Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran krusial sebagai fasilitator dan katalisator perubahan sosial dan ekonomi, bukan sekadar pelaksana program formal.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional adalah sektor pertanian, karena masih menjadi tumpuan utama mata pencaharian masyarakat desa. Namun demikian, kenyataannya masih banyak kelompok tani yang belum mampu mengelola potensi pertanian secara optimal karena keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, serta lemahnya kelembagaan petani (Kasming, 2019) (Tumanggor, 2022). Di sinilah pentingnya kehadiran pemerintah dalam menjalankan peran-peran strategisnya, termasuk memberikan dukungan teknis, regulasi, serta pelatihan kepada kelompok tani.

Kelompok tani sebagai lembaga petani akar rumput memegang peran penting dalam penyebaran inovasi, pengelolaan bantuan, dan penguatan jejaring usaha tani. Namun efektivitas kelembagaan ini sangat bergantung pada sejauh mana intervensi dan pendampingan yang dilakukan pemerintah (Sari, 2021). Pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pemerintahan lokal diharapkan mampu menjadi aktor utama yang menggerakkan pemberdayaan berbasis komunitas pertanian.

Desa Nupabomba di Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, adalah salah satu contoh wilayah yang memiliki potensi pertanian cukup besar, tetapi belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Meskipun terdapat 27 kelompok tani yang aktif,

banyak dari mereka masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya produktivitas dan lemahnya dukungan pemerintah dalam hal fasilitasi dan pelatihan (Razak, 2023). Situasi ini menjadi alasan pentingnya studi mengenai peran pemerintah dalam mendukung pemberdayaan kelompok tani di desa tersebut.

Masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani di Desa Nupabomba. Permasalahan utama yang muncul adalah rendahnya produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi, yang disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dalam melakukan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan teknis secara rutin. Hal ini sejalan dengan temuan (Tokan, 2024) yang menunjukkan bahwa rendahnya intensitas pembinaan dan keterlibatan pemerintah desa berdampak signifikan terhadap stagnasi kinerja kelompok tani dalam mengelola pertanian secara berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah desa dinilai belum optimal dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian seperti alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, benih unggul, dan modal usaha. Ketimpangan distribusi bantuan tersebut menciptakan ketidakadilan di antara kelompok tani. Beberapa kelompok menerima bantuan berulang, sementara kelompok lainnya belum mendapatkan intervensi apapun. (Ramli, 2023) mengungkapkan bahwa ketidakmerataan bantuan dapat menimbulkan kecemburuan sosial serta melemahkan solidaritas dan kinerja kelompok.

Kendala lainnya adalah lemahnya sistem penyuluhan pertanian dan minimnya kunjungan lapangan. Penyuluh yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberdayaan petani belum berfungsi maksimal akibat terbatasnya jumlah tenaga dan kurangnya fasilitas pendukung. Menurut (Revida, 2024), lemahnya sistem penyuluhan menyebabkan petani kesulitan mengakses informasi teknologi pertanian modern dan hanya mengandalkan cara-cara tradisional yang belum tentu efisien dalam menghadapi tantangan pertanian masa kini.

Pemberdayaan yang ideal seharusnya tidak hanya fokus pada pemberian bantuan material, tetapi juga harus mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia petani, seperti keterampilan teknis, penguatan kelembagaan, serta akses terhadap informasi pasar. Dalam hal ini, peran penyuluh dan pemerintah desa sebagai pendamping sangat penting. (Sumampow, 2021) menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada pola hubungan yang intensif, partisipatif, dan adaptif antara pemerintah dan kelompok tani.

Teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid menyebutkan bahwa pemerintah memiliki empat fungsi utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Sebagai regulator, pemerintah bertugas menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan program pemberdayaan. Sebagai dinamisator, pemerintah harus mampu menggerakkan potensi dan partisipasi masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan sarana, prasarana, serta dukungan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan sebagai katalisator, pemerintah menjadi pemicu terjadinya perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat melalui inovasi dan intervensi

strategis. Keempat fungsi tersebut jika dijalankan dengan baik akan mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.

Keempat fungsi tersebut belum terlaksana secara optimal. Pemerintah desa belum menunjukkan peran yang kuat sebagai regulator dalam mengatur dan mengembangkan program pertanian. Dinamika kelompok tani tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan daya inovasi. Fasilitasi terhadap kebutuhan kelompok tani masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh anggota kelompok secara adil dan merata. Selain itu, peran sebagai katalisator juga belum terlihat melalui kebijakan-kebijakan yang mampu memacu produktivitas dan daya saing kelompok tani.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat di pedesaan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan harus mampu membaca kebutuhan masyarakat secara akurat dan meresponsnya dengan kebijakan yang solutif dan aplikatif. Dalam hal pemberdayaan kelompok tani, pendekatan yang digunakan harus berbasis pada partisipasi aktif masyarakat, sehingga setiap intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pendekatan top-down yang selama ini digunakan perlu diganti dengan pendekatan bottom-up yang lebih responsif dan inklusif.

Selain itu, penting juga untuk membangun sinergi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh, lembaga pendidikan, serta sektor swasta dalam mengembangkan pertanian desa. Kolaborasi multipihak ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Pemerintah desa harus menjadi motor penggerak utama dalam membangun kemitraan strategis tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui forum musyawarah desa, penguatan kelembagaan desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal manajemen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana keterlibatan pemerintah dalam mendorong kemandirian kelompok tani serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan di masa yang akan datang. Dengan memahami peran pemerintah secara menyeluruh, diharapkan proses pemberdayaan yang terjadi di masyarakat benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian petani di desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari anggota kelompok tani, perangkat desa, serta pihak dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Nupabomba. Teknik analisis data mengacu pada model

Miles dan Huberman yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil

Penelitian mengenai Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sejauh mana peran pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani di desa tersebut. Fokus utama penelitian ini mengacu pada teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid yang terdiri dari empat peran: regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat peran tersebut telah dijalankan oleh pemerintah, namun belum secara optimal. Penjabaran berikut akan menguraikan temuan dari masing-masing peran secara mendalam.

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Dalam aspek ini, peran regulator menuntut pemerintah untuk membuat peraturan atau kebijakan yang dapat mengarahkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini kelompok tani. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pemerintah desa dan Dinas Pertanian telah menunjukkan upaya dalam penyusunan regulasi teknis untuk mendukung kegiatan pertanian. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan struktur kelompok tani berdasarkan jenis komoditas pertanian dan wilayah administrasi desa.

Namun, regulasi yang dibuat masih bersifat umum dan belum memiliki turunan kebijakan yang mengatur secara spesifik mengenai pembinaan berkelanjutan, pengalokasian bantuan, maupun kewajiban kelompok tani dalam pelaporan hasil kegiatan. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan banyak dilakukan secara informal, tanpa melalui forum musyawarah kelompok tani yang semestinya menjadi bagian dari sistem kelembagaan tani. Selain itu, tidak ada sistem monitoring dan evaluasi regulasi yang memadai, sehingga aturan yang telah dibuat sulit diukur efektivitasnya.

Pemerintah desa belum maksimal dalam menyosialisasikan aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan kelompok tani. Misalnya, banyak petani yang belum mengetahui prosedur atau syarat mendapatkan bantuan alsintan, benih, atau pupuk bersubsidi. Hal ini mencerminkan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan kelompok tani yang seharusnya dilakukan secara berkala. Padahal, peran regulator sangat menentukan dalam menciptakan tatanan hubungan yang adil dan berkeadilan antara masyarakat tani dengan pemerintah serta pihak eksternal lainnya.

2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, pemerintah seharusnya menjadi motor penggerak bagi kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam konteks

ini, kegiatan penyuluhan, pelatihan, motivasi, dan pendampingan menjadi bagian integral dari peran ini. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pemerintah, khususnya melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Desa Nupabomba, telah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada kelompok tani terkait cara pengolahan lahan, penanganan hama, dan pengelolaan pupuk. Namun, kegiatan tersebut belum dilakukan secara berkelanjutan dan terjadwal.

Kegiatan sosialisasi cenderung dilakukan hanya ketika terdapat program dari dinas atau instansi terkait yang bersifat top-down. Petugas penyuluh yang ditugaskan di desa juga mengalami kendala dalam hal jumlah personel yang terbatas, cakupan wilayah kerja yang luas, serta kurangnya fasilitas penunjang untuk menjalankan tugas. Akibatnya, penyuluhan yang dilakukan tidak menyentuh seluruh kelompok tani secara merata. Kelompok tani yang lokasinya jauh dari pusat desa cenderung jarang mendapatkan informasi maupun pembinaan.

Meskipun pemerintah telah mencoba mendorong semangat dan keterlibatan petani melalui pertemuan dan bimbingan teknis, pendekatan yang digunakan masih belum mampu menciptakan dinamika kelompok yang aktif. Sebagian besar kelompok tani bersifat pasif dan hanya aktif jika ada bantuan dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan dinamisor belum menyentuh aspek pemberdayaan yang mendorong kemandirian dan inisiatif kelompok. Petani masih mengandalkan bantuan eksternal dan belum terbiasa membuat perencanaan atau inisiatif program kerja secara mandiri.

3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran fasilitator berarti bahwa pemerintah tidak hanya hadir sebagai pengarah, tetapi juga sebagai pihak yang membantu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian. Berdasarkan hasil penelitian, peran ini telah terlihat dari adanya bantuan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diberikan oleh Dinas Pertanian kepada kelompok tani di Desa Nupabomba. Namun, distribusi bantuan tersebut belum dilakukan secara adil dan merata kepada seluruh kelompok tani, terutama kelompok tani padi yang menjadi fokus penelitian ini.

Beberapa kelompok mengaku belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, sementara kelompok lain menerima bantuan namun tidak dalam kondisi yang memadai. Hal ini menciptakan ketimpangan dan kecemburuan sosial di antara anggota kelompok tani. Selain itu, bantuan alsintan seperti traktor dan pompa air seringkali tidak disertai dengan pelatihan penggunaan atau perawatan, sehingga alat tersebut menjadi tidak maksimal penggunaannya, bahkan rusak dalam waktu singkat.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah desa belum memiliki alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan kelompok tani secara rutin. Pendanaan masih bergantung pada program dari dinas atau proyek pemerintah yang sifatnya jangka pendek. Ketiadaan dana desa yang dialokasikan secara khusus untuk pemberdayaan pertanian menyebabkan kegiatan kelompok tani terhambat, terutama dalam hal operasional, seperti pengadaan pupuk, benih, serta biaya pengelolaan kelompok.

Pelatihan atau pendidikan nonformal yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani juga sangat terbatas. Dari hasil wawancara, petani menginginkan adanya pelatihan intensif mengenai teknik pertanian modern, pemanfaatan pupuk organik, pemasaran hasil pertanian, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pertanian. Namun, aspirasi ini belum dapat diwujudkan karena keterbatasan anggaran dan prioritas kebijakan pemerintah yang belum mengarah ke pembangunan sumber daya manusia petani.

4. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran katalisator menekankan pentingnya pemerintah sebagai pemicu atau pendorong percepatan perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan kelompok tani, pemerintah seharusnya mampu menciptakan model atau praktik terbaik yang dapat ditiru oleh kelompok tani lainnya, sekaligus mendorong inovasi lokal yang mendukung pertanian berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa bersama Dinas Pertanian telah melakukan pemantauan kegiatan kelompok tani sebanyak dua kali dalam setahun. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kegiatan kelompok, kendala yang dihadapi, serta peluang pengembangan usaha tani. Namun, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa pemantauan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan manajemen kelompok ataupun peningkatan hasil produksi.

Pemantauan yang dilakukan cenderung bersifat formalitas dan belum disertai dengan tindak lanjut atau rekomendasi yang konkrit. Tidak ada laporan tertulis yang menjadi bahan evaluasi kebijakan di tingkat desa atau dinas. Hal ini menyebabkan potensi inovasi yang ada di lapangan tidak terdokumentasikan dan tidak ditindaklanjuti secara sistematis.

Pemerintah juga belum berhasil menciptakan jejaring kerjasama antara kelompok tani dengan pihak lain seperti koperasi, lembaga keuangan, pasar, atau institusi pendidikan. Padahal, kolaborasi multipihak sangat penting untuk menciptakan sistem pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sebagai katalisator, pemerintah seharusnya memainkan peran penghubung (broker) antara petani dengan mitra strategis yang dapat membantu pengembangan usaha tani.

Selain itu, pemerintah desa belum menjadikan pertanian sebagai isu prioritas dalam musyawarah pembangunan desa. Akibatnya, usulan atau kebutuhan kelompok tani sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam pengambilan keputusan. Ketiadaan kebijakan afirmatif terhadap sektor pertanian mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjadikan pertanian sebagai penggerak ekonomi desa.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea,

Kabupaten Donggala. Penelusuran ini menggunakan teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid (2010) yang mencakup peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Keempat peran tersebut digunakan sebagai kerangka analisis terhadap temuan lapangan, yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan kunci.

1. Pemerintah sebagai Regulator

Sebagai regulator, pemerintah diharapkan mampu menetapkan aturan yang mengatur dan mengarahkan kegiatan kelompok tani secara sistematis. Di Desa Nupabomba, pemerintah desa bersama Dinas Pertanian telah membuat beberapa aturan dasar tentang pembentukan kelompok tani. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum dibarengi dengan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang kuat.

Seorang ketua kelompok tani menyampaikan:

“Kami sudah lama dibentuk sebagai kelompok tani, tapi untuk aturan yang mengikat itu tidak terlalu jelas. Kadang kita bingung juga, siapa yang urus alat bantuan, siapa yang boleh pakai duluan, karena tidak ada aturan tertulisnya.” (Wawancara, Ketua Kelompok Tani Jagung, 20 Maret 2024)

Keterangan ini mengindikasikan bahwa meskipun struktur kelembagaan telah terbentuk, namun substansi pengaturannya belum jelas, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok. (Saragih, 2020) menyatakan bahwa regulasi yang lemah dapat menyebabkan ketimpangan dalam pengelolaan kelompok dan berpotensi memunculkan konflik antaranggota.

Selain itu, ketidakterlibatan anggota dalam penyusunan kebijakan juga menyebabkan rendahnya rasa memiliki terhadap aturan yang dibuat.

“Kalau ada aturan dari atas, biasanya kami cuma dengar waktu rapat. Tapi kadang kami tidak tahu isinya lengkapnya bagaimana.” (Wawancara, Anggota Kelompok Tani Padi, 21 Maret 2024)

Ini menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan yang berdampak pada kegiatan mereka. Padahal, (Sutrisno, 2022) menekankan bahwa kebijakan partisipatif sangat penting dalam memastikan regulasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran dinamisator dijalankan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan yang mendorong semangat dan keterlibatan aktif petani. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ini belum terlaksana secara maksimal. Banyak kelompok tani yang mengeluh kurangnya kunjungan penyuluh atau pendamping lapangan.

“Dulu pernah ada penyuluh datang kasih tahu cara pakai pupuk yang benar. Tapi sekarang sudah jarang, paling datang setahun sekali, itu juga sebentar.” (Wawancara, Petani Padi, 22 Maret 2024)

Pernyataan ini memperkuat hasil observasi bahwa kegiatan pendampingan oleh penyuluh pertanian belum terjadwal secara rutin. Padahal, (Yulianti, 2021) menemukan bahwa penyuluhan berkala mampu meningkatkan pemahaman petani dan berdampak langsung pada peningkatan hasil panen.

Minimnya intensitas penyuluhan membuat petani hanya bertindak berdasarkan pengalaman lama atau kebiasaan tanpa inovasi.

“Kami tanam seperti biasa saja, kalau hasilnya bagus ya syukur, kalau tidak ya tunggu musim berikutnya.” (Wawancara, Petani Jagung, 22 Maret 2024)

Hal ini mencerminkan bahwa dinamika kelompok belum terbentuk secara ideal. Pemerintah belum benar-benar menjadi penggerak semangat dan pembaharu pola pikir petani. Dinamisasi seharusnya mampu menciptakan kelompok tani yang aktif, mandiri, dan inovatif.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Dalam peran fasilitator, pemerintah bertugas menyediakan sarana dan prasarana serta dukungan teknis untuk memudahkan petani dalam mengembangkan usahanya. Di Desa Nupabomba, beberapa kelompok telah menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), namun distribusinya belum merata dan seringkali tidak diikuti dengan pelatihan.

“Kami pernah dapat traktor, tapi karena tidak semua bisa pakai, akhirnya disimpan saja. Tidak ada pelatihan atau pendampingan.” (Wawancara, Ketua Kelompok Tani, 23 Maret 2024)

Fenomena ini sesuai dengan temuan (Kurniawan, 2020) bahwa pemberian bantuan fisik tanpa pelatihan hanya akan menghasilkan ketergantungan dan membatasi keberlanjutan pemanfaatannya.

Selain itu, tidak semua kelompok memperoleh bantuan tersebut. Beberapa kelompok menyatakan belum pernah menerima bantuan sama sekali, baik berupa alat, bibit, maupun pupuk.

“Kami sudah ajukan proposal dari dua tahun lalu, tapi belum pernah ada bantuan masuk.” (Wawancara, Sekretaris Kelompok Tani Sayur, 23 Maret 2024)

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa fasilitasi yang dilakukan belum merata dan kurang berbasis kebutuhan. Menurut (Handok, 2019), fasilitasi harus bersifat responsif, artinya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban program.

Ketiadaan pelatihan dan akses terhadap informasi juga membuat kelompok tani kesulitan dalam meningkatkan kapasitas mereka.

“Kalau ada pelatihan, kami mau ikut. Tapi belum pernah ada undangan dari desa atau dinas.” (Wawancara, Petani Muda, 24 Maret 2024)

4. Pemerintah sebagai Katalisator

Peran katalisator mengharuskan pemerintah untuk menjadi pemicu perubahan sosial, ekonomi, dan inovasi dalam kelompok tani. Sayangnya, di Desa Nupabomba,

peran ini juga belum berjalan maksimal. Pemerintah hanya melakukan monitoring dua kali dalam setahun, dan itu pun hanya bersifat administratif.

“Biasanya hanya tanya-tanya saja, cek absen kelompok, terus pulang. Tidak ada masukan atau bimbingan lebih lanjut.” (Wawancara, Ketua Kelompok Tani Padi, 24 Maret 2024)

Kondisi ini memperlihatkan bahwa monitoring tidak digunakan sebagai alat evaluasi dan perbaikan. Menurut (Razak, 2023), peran katalisator tidak boleh berhenti pada pemantauan, tetapi harus dilanjutkan dengan pembinaan dan penciptaan ruang inovasi.

Pemerintah juga belum mendorong jejaring atau kemitraan dengan pihak eksternal seperti koperasi, lembaga pembiayaan, atau perguruan tinggi.

“Kalau bisa ada yang bantu pasarkan hasil panen, kami sangat terbantu. Tapi selama ini dijual sendiri saja ke tengkulak.” (Wawancara, Petani, 25 Maret 2024)

(/Sari, 2021) menekankan pentingnya program percontohan dan kemitraan strategis untuk mempercepat pemberdayaan. Pemerintah desa dapat menciptakan model kelompok tani unggulan sebagai inspirasi bagi kelompok lain, namun di Nupabomba, inisiatif tersebut belum terlihat.

Kutipan wawancara dari para petani di Desa Nupabomba menggambarkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah belum memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Pemerintah belum hadir secara aktif dan berkelanjutan dalam mendampingi kelompok tani. Peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator masih bersifat sektoral dan tidak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa.

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan kelompok tani melalui pelatihan, pendampingan, dan regulasi berbasis partisipatif.
2. Mendorong penyuluhan intensif dan pelibatan petani dalam perencanaan dan evaluasi program.
3. Mengoptimalkan dana desa untuk mendukung sektor pertanian secara langsung dan terukur.
4. Membangun kolaborasi antara kelompok tani dengan stakeholder eksternal seperti koperasi, pasar, dan lembaga pendidikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, dapat disimpulkan bahwa secara umum pemerintah telah menjalankan empat peran utama sebagaimana dikemukakan oleh Ryaas Rasyid, yakni sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator, namun pelaksanaannya belum optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi teknis, kebijakan, maupun partisipasi masyarakat.

Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah telah membentuk kelembagaan kelompok tani dan menetapkan beberapa regulasi dasar untuk mendukung aktivitas pertanian. Namun, regulasi tersebut belum memiliki kekuatan implementatif yang kuat, karena minimnya sistem pengawasan dan evaluasi. Partisipasi petani dalam

perumusan aturan juga masih rendah, sehingga aturan yang berlaku tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil petani di lapangan. Ketidakjelasan prosedur dan kurangnya sosialisasi turut memperlemah peran regulasi dalam mendukung pemberdayaan kelompok tani secara menyeluruh.

Peran pemerintah sebagai dinamisator belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendorong dinamika dan partisipasi aktif kelompok tani. Penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan belum berjalan secara rutin dan hanya dilakukan secara insidental ketika ada program dari dinas pertanian. Akibatnya, sebagian besar kelompok tani bersifat pasif, dan semangat inovasi petani pun belum terbentuk. Padahal, dinamisasi merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang aktif dan berdaya saing tinggi di bidang pertanian.

Dalam aspek fasilitator, pemerintah telah memberikan bantuan berupa alat dan mesin pertanian kepada beberapa kelompok tani. Akan tetapi, distribusi bantuan tersebut belum merata, dan tidak semua kelompok mendapatkan pelatihan teknis penggunaan alat tersebut. Selain itu, akses terhadap informasi, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan terhadap pengelolaan usaha tani masih sangat terbatas. Kesenjangan fasilitasi ini menghambat peningkatan kapasitas kelompok tani, terutama dalam hal produksi, manajemen, dan pemasaran.

Sebagai katalisator, pemerintah desa belum berhasil menciptakan perubahan yang signifikan dalam sistem pertanian di desa tersebut. Kegiatan monitoring yang dilakukan hanya bersifat administratif tanpa disertai tindak lanjut atau inovasi kebijakan. Belum terbentuknya jejaring antara kelompok tani dengan lembaga eksternal seperti koperasi, perbankan, atau lembaga pendidikan juga menjadi kendala dalam mendorong pertumbuhan ekonomi petani secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Nupabomba masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari rendahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang strategis dan berkelanjutan, di antaranya peningkatan kapasitas aparatur desa, pelatihan teknis bagi petani, penyusunan regulasi berbasis partisipatif, serta penguatan kemitraan antara kelompok tani dan stakeholder lainnya. Dengan demikian, pemberdayaan kelompok tani dapat berlangsung secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan jurnal ini, khususnya kepada dosen pembimbing, informan di Desa Nupabomba, serta keluarga dan sahabat atas segala doa, bimbingan, dan motivasinya.

Referensi

- Ali, F dan Kadir, G. (2014). *Manajemen Penelitian Berbasis Sasaran*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Ardianto, A. (2011). *Handbook of Public Relations*. Bandung. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Arniza, M. (2022). *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosiasl dan ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Bahtiar, A. M. (2011). *Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pengembangan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) di Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara*. Skripsi Unismuh Makassar.
- Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hatu, R. A. (2010). *Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat*. Jurnal Inovasi, 7 (4): 240-254
- Hermanto dan Swastika. (2011). *Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, 9 (4): 371-390.
- Kasming. (2019). *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
- Mardikanto, T. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta
- Miles. M. B, Huberman A. M, dan Saldana J. (2014). *Qualitatif Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA: Sage Publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi, UI Press.
- Moniung, N. E., Sambiran, S., & Rachman, I. (2023). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa*. Governance, 3(2), 1–7.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang.
- Nippi, A. T dan Pananrangi, A. M. (2019). *Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani*. Jurnal Meraja, 2 (1): 35-47
- Nurjannah, A., & Revida, E. (2024). *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*. SAJJANA: Public Administration Review, 2(1), 26–30. <https://talenta.usu.ac.id/sajjana/article/view/17321>
- Pamudji, S. S. (2012). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 10–19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/35369>
- Ramli, H. (2023). *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/39278-Full_Text.pdf
- Rasyid, M. R. (2010). *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*.

- Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Razak, A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Padi di Kabupaten Soppeng. Skripsi Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Samsi, H. S. (2011). *Dinamika Kelompok. Teori dan Aplikasinya untuk Analisis Keberhasilan Kelompok Tani Sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi dan Bisnis*. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif R&D*. cetakan ke-19. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Sukino. (2013). *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakatn Tani Terobosan Menaggulangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryadi. (2020). *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Suryani dan Hendriyadi. (2015). *Metode Riset Kualitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidan Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tokan, F. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Putun Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 5(1), 1–9. <https://www.academia.edu/124077453/>
- Tumanggor, H. (2022). *Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Sionom Hudon Tonga Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Soisal dan Politik Universitas Medan Area.